

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Perilaku memilih**

#### **1. Pengertian Perilaku memilih**

Menurut Abdul Munir Mulkan dalam Mahendra (2005: 71), perilaku memilih adalah fungsi dari kondisi sosial dan ekonomi serta kepentingan, maka perilaku memilih sebagian di antaranya adalah produk dari perilaku sosial ekonomi dan kepentingan suatu masyarakat atau golongan dalam masyarakat tersebut.

Menurut Sudiono Sastroatmodjo (1995) dalam Mahendra (2005: 72), perilaku memilih berkenaan dengan tujuan suatu masyarakat, kebijakan untuk mencapai tujuan, serta sistem kekuasaan yang memungkinkan adanya suatu otoritas untuk mengatur kehidupan bermasyarakat kearah pencapaian tujuan.

Menurut Ramlan Surbakti (1992), perilaku memilih dapat dibagi menjadi dibagi dua, yaitu perilaku memilih lembaga-lembaga atau para pejabat pemerintah dan perilaku memilih warga negara biasa (baik individu maupun kelompok). Perilaku memilih pada lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah yang ada di dalamnya bertanggungjawab membuat, melaksanakan, dan menegakkan keputusan politik. Sebaliknya pihak yang kedua tidak

berwenang seperti yang pertama, tetapi berhak mempengaruhi pihak pertama dalam melaksanakan fungsinya, karena yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik pihak kedua ini disebut partisipasi politik.

Menurut Mahendra (2005: 75), perilaku memilih adalah tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik, atau isu publik tertentu. Perilaku memilih merupakan tindakan seseorang dalam memberikan pilihan pada calon elit politik, partai politik atau isu politik tertentu.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, maka perilaku memilih adalah buah dari pikiran dan tindakan seseorang maupun masyarakat yang berkenaan dengan kepentingan atau tujuan dalam mempengaruhi proses pembuatan dan melaksanakan keputusan politik.

## **2. Pendekatan Perilaku memilih**

Menurut Surbakti (1992: 145), terdapat beberapa pendekatan untuk mengetahui perilaku memilih masyarakat, yaitu sebagai berikut:

### **a. Pendekatan struktural**

Pendekatan struktural melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial, sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditonjolkan oleh setiap partai. Struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial atau perbedaan antara majikan dan pekerja, agama, perbedaan kota dan desa, dan bahasa dan nasionalisme.

b. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan sosiologis cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. Kongkretnya, pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi latar belakang demografi dan sosial ekonomi, seperti etnis, jenis kelamin, tempat tinggal (kota-desa), pekerjaan, pendidikan, kelas, pendapatan, dan agama.

c. Pendekatan Ekologis

Pendekatan ekologis hanya relevan apabila dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial, seperti desa, kelurahan, kecamatan, dan kabupaten. Jika di Amerika Serikat terdapat *distrik, precinct, dan ward*. Kelompok masyarakat, seperti tipe penganut agama tertentu, buruh, kelas menengah, mahasiswa, subkultur tertentu, dan profesi tertentu bertempat tinggal pada unit teritorial sehingga perubahan komposisi penduduk yang tinggal di unit teritorial dapat dijadikan sebagai penjelasan atas perubahan hasil pemilihan umum.

d. Pendekatan Psikologi Sosial

Pendekatan psikologi sosial sama dengan penjelasan yang diberikan dalam pendekatan perilaku memilih. Salah satu konsep psikologi sosial yang digunakan untuk menjelaskan perilaku untuk memilih pada pemilihan umum berupa identifikasi partai. Konsep ini merujuk pada persepsi pemilih atas partai-partai yang ada atau keterikatan emosional pemilih terhadap partai tertentu. Kongkretnya, partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat dengannya merupakan partai yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor lain.

e. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional melihat kegiatan memilih sebagai produk kalkulasi untung dan rugi, yang dipertimbangkan tidak hanya "ongkos" memilih dan kemungkinan suaranya dapat mempengaruhi hasil yang diharapkan, tetapi juga perbedaan dari alternatif berupa pilihan yang ada. Pertimbangan ini digunakan pemilih dan kandidat yang hendak mencalonkan diri untuk terpilih sebagai wakil rakyat atau pejabat pemerintah. Bagi pemilih pertimbangan untung dan rugi digunakan untuk membuat keputusan apakah ikut memilih atau tidak.

Sedangkan menurut Heywood (1997: 224), perilaku memilih dapat diidentifikasi dengan beberapa pendekatan yaitu:

a. Pendekatan Identifikasi Partai

Teori paling awal dari perilaku memilih adalah pendekatan indentifikasi partai yang merupakan bagian dalam faktor psikologis, ini didasarkan pada pengaruh psikologis dari orang-orang yang menjadi anggota partai. Pemilih melihat orang yang dipilih dengan mengidentifikasi dari partai yang diikuti, hal ini termasuk dukungan dalam jangka panjang untuk menghormati partai mereka sendiri. Pemungutan suara merupakan suatu penjelmaan sikap berat sebelah, bukan produk kalkulasi yang dipengaruhi faktor kebijakan, kepribadian, kampanye dan pemberitaan media.

b. Pendekatan Sosiologis

Hubungan antara pendekatan sosiologis dengan perilaku memilih terhadap minat pada suatu grup didukung oleh tujuan pemilih untuk mengadopsi pola memilih yang merefleksikan posisi ekonomi dan sosial pada grup di

mana mereka tergabung. Lebih dari itu pengembangan faktor psikologis yang mempengaruhi partai yang berasal dari pengaruh keluarga. Sorotan utama dari pendekatan ini adalah kepentingan dari perjanjian sosial, mencerminkan tekanan didalam kemasyarakatan. Hal yang paling penting untuk bagian ini adalah kelas, gender, etnisitas, agama, dan wilayah.

c. Pendekatan Pilihan Rasional

Pendekatan pilihan rasional lebih memperhatikan pendapat individu dan jauh dari sosialisasi dan perilaku kelompok sosial. Di sini pemungutan suara dilihat sebagai sikap yang rasional, pemilih individu percaya untuk memilih partai dan mereka lebih memilih kepada seseorang yang diminati. Telah menjadi suatu kebiasaan ada suatu manifestasi pengaruh dan kesetiaan dalam pemungutan suara yang dianggap sebagai alat penting. Pemilihan dalam hal ini merupakan pola pikir masa lalu dalam kekuasaan partai dan bagaimana penampilannya mempengaruhi pilihan masyarakat.

d. Pendekatan Ideologi Dominan

Radikal teori dalam pemilihan suara menuju kepada fokus utama dari tingkat pilihan individu yang dibentuk oleh proses dari manipulasi ideologi dan kontrol. Di beberapa anggapan seperti beberapa perubahan teori dalam pendekatan sosiologi, pemungutan suara disebut sebagai kedudukan seseorang dalam hierarki sosial di mana teori ini berbeda dengan pendekatan sosiologi, meskipun begitu bagaimana individu menginterpretasikan posisi mereka bergantung pada bagaimana mereka dilihat dari segi pendidikan oleh pemerintah dan oleh media massa.

Sementara itu menurut Afan Gaffar (1992: 27), beberapa pendekatan perilaku memilih adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan sosiologis

Pada dasarnya menjelaskan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial seperti umur (tua-muda), jenis kelamin (laki-perempuan), agama dan sebagainya, dianggap mempunyai peranan yang cukup menentukan dalam membentuk perilaku pemilih. Untuk itu, pemahaman terhadap pengelompokan sosial baik secara formal seperti keanggotaan seseorang dalam organisasi-organisasi keagamaan, organisasi-organisasi profesi, kelompok-kelompok okupasi dan sebagainya, maupun pengelompokan-pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya merupakan sesuatu yang sangat vital dalam memahami perilaku memilih, karena kelompok ini mempunyai peranan besar dalam membentuk sikap, persepsi dan orientasi seseorang.

b. Pendekatan psikologis

Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi, untuk menjelaskan perilaku pemilih. Menurut pendekatan ini pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai produk dari proses sosialisasi. Melalui proses sosialisasi, berkembang ikatan psikologis yang kuat antara seseorang dengan organisasi kemasyarakatan atau partai politik. Sosialisasi politik menunjuk pada proses pembentukan sikap-sikap

dan pola tingkah laku politik serta merupakan sarana bagi generasi untuk mewariskan patokan dan keyakinan politik pada generasi sesudahnya.

c. Pendekatan politis rasional

Pada pendekatan ini isu-isu politik menjadi pertimbangan penting. Para pemilih akan menentukan pilihan berdasarkan penilaiannya terhadap isu-isu politik dan kandidat yang diajukan. Artinya para pemilih dapat menentukan pilihan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan rasional.

Berdasarkan uraian di atas maka kajian dalam penelitian ini dibatasi pada pendekatan sosiologis sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku memilih. Sesuai dengan teori yang dikemukakan Afan Gaffar (1992: 27), bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan-pengelompokan sosial mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku memilih. Pengelompokan sosial tersebut terdiri dari kelompok umur, jenis kelamin, etnisitas maupun agama. Pengelompokan sosial dapat bersifat formal seperti organisasi dan perkumpulan, maupun pengelompokan informal seperti keluarga, pertemanan, ataupun kelompok-kelompok kecil lainnya.

### **3. Studi Tentang Perilaku Pemilih di Indonesia**

Kajian mengenai perilaku pemilih telah banyak dijelaskan oleh para ahli seperti Afan Gaffar dan Kristiadi, dan hingga sekarang konsep tersebut masih dikumandangkan oleh para-para ahli penerusnya. Hingga saat ini, paling tidak terdapat enam studi penting mengenai perilaku pemilih di Indonesia. Semua studi ini melihat pemilih pada titik sentral dan menjelaskan faktor dan alasan pemilih memilih partai politik tertentu. Namun, diluar enam studi mengenai

perilaku pemilih, kemungkinan banyak studi lain dalam penelitian di kampus (skripsi, thesis ataupun disertasi). Meski demikian, enam studi inilah yang hingga saat ini kerap disebut dan banyak dikutip untuk menjelaskan perilaku pemilih di Indonesia, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Studi Perilaku Pemilih Yang Pernah Dilakukan.

STUDI	OBJEK PEMILU	METODE
Gaffar (1992)	1987	Survei
Mallarangeng (1997)	1977, 1982, 1987, 1992	Data agregat
Ananta ( <i>et.al</i> , 2004)	1999	Data agregat
King (2003)	1999	Data agregat
Liddle dan Mujani (2000)	1999	Survei
Liddle dan Mujani (2007)	2004	Survei

Sumber: [www.lsi.co.id/media/](http://www.lsi.co.id/media/). Diakses Tanggal 13 Juni 2010.

Penelitian Gaffar (1992) tentang *Javanese Voters* yang menelaah pendekatan struktural Geertz dan *traditional authority* dari Jackson. Gaffar berupaya menjelaskan mengenai perilaku memilih di kalangan masyarakat Jawa. Mengapa masyarakat memilih partai politik tertentu dalam Pemilu Orde Baru. Faktor apa yang menyebabkan seseorang memilih Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI). Dalam studinya, Afan Gaffar menjelaskan empat variabel yang digunakan yaitu *the socio-religious beliefs (abangan dan santri)*, *party identification*, *the pattern of leadership*, and *class or social status*.

Studi J. Kristiadi (1994), dengan variabel *socio cultural* menemukan bahwa secara kuantitatif, pengaruh panutan masih kuat bagi kecenderungan perilaku politik memilih masyarakat sehingga orientasi perilaku memilih masyarakat masih paternalistis. Secara umum, penelitian pada akhir era orde baru (1992 dan 1997) menunjukkan di beberapa tempat di Jawa sebagian masyarakat

menunjukkan partisipasi yang semakin baik. Sebenarnya studi Gaffar dan Kristiadi berbeda, studi Gaffar mengambil sampel kelompok masyarakat yang relatif homogen (masyarakat desa), sementara itu studi Kristiadi mengambil sampel masyarakat desa dan kota untuk lebih memperoleh kejelasan tentang pola perilaku pemilih dari dua jenis masyarakat yang berbeda karakternya.

(Sumber: <http://www.scribd.com/>, diakses pada tanggal 13 Juni 2010).

Studi selanjutnya dilakukan oleh Mallarangeng (1997) yang menjelaskan faktor yang mempengaruhi pilihan seseorang pada partai politik di masa Orde Baru Pemilu 1977, 1982, 1987, dan 1992. Pasca tumbangya Orde Baru studi mengenai perilaku pemilih mulai marak dilakukan. Pemilu 1999 adalah pemilu pertama setelah pemilu 1955 yang dilakukan secara demokratis, pemilih mempunyai otonomi untuk menentukan partai apa yang didukung. Studi mengenai perilaku pemilih menjadi relevan untuk dilakukan

(Sumber: [www.lsi.co.id/media/](http://www.lsi.co.id/media/). Diakses Tanggal 13 Juni 2010).

Studi King (2003), Ananta (*et.al*, 2004) dan Liddle dan Mujani (2000) adalah salah satu contoh dari penelitian mengenai perilaku pemilih yang menggunakan objek Pemilu tahun 1999. King (2003) berusaha melihat apakah ada persamaan pilihan antara pemilih tahun 1955 dengan pemilih pada Pemilu 2004. Fakta-fakta empiris yang diajukan oleh King ini menunjukkan adanya suatu kontinuitas, korelasi signifikan antara daerah-daerah pendukung partai-partai tertentu pada tahun 1955 dan daerah-daerah pendukung partai-partai tertentu pada 1999. King berusaha untuk menjelaskan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pilihan pemilih pada suatu partai politik, Analisis King

ini didasarkan pada hasil Pemilu 1999. King mengembangkan suatu model yang disebut sebagai konteks sosioekonomik. Dengan kata lain, King ingin menguji apakah konteks sosial ekonomi punya pengaruh terhadap pilihan seseorang terhadap partai politik. Ananta (*et.al*, 2004) mengembangkan lebih lanjut studi dan temuan King (2003).

(Sumber: [www.lsi.co.id/media/](http://www.lsi.co.id/media/). Diakses Tanggal 13 Juni 2010).

Ananta menggunakan data-data yang lebih baru, sedangkan studi ekstensif mengenai perilaku pemilih dilakukan oleh Liddle dan Mujani (2000, 2007). Studi ini menggunakan konsep mutakhir mengenai perilaku pemilih yang biasa dilakukan di Amerika. Studi ini juga menggunakan metode survei dengan populasi nasional, sehingga hasilnya representatif dan bisa mewakili pendapat dari seluruh masyarakat Indonesia

(Sumber: [www.lsi.co.id/media/](http://www.lsi.co.id/media/). Diakses Tanggal 13 Juni 2010).

Menurut Nursal (2004), perkembangan politik yang semakin maju kini membawa perubahan untuk mengkaji perilaku pemilih lebih jauh lagi, ini didukung dengan munculnya pendekatan baru dalam mengkaji perilaku memilih yaitu pendekatan *Political Marketing*. Sebagai kajian keilmuan baru yang masih dalam tataran embrionik, marketing politik yang pertama kali dimulai di Amerika Serikat terus mengalami perkembangan definisi yang beragam dan berubah. *Political marketing* merupakan serangkaian aktivitas terencana, strategis tapi juga taktis, berdimensi jangka panjang dan jangka pendek, untuk menyebarkan makna politik kepada pemilih. Sehingga *political*

*marketing* bertujuan membentuk dan menanamkan harapan, sikap, keyakinan, orientasi dan perilaku pemilih.

Bambang Ary Wibowo (2005) menyamakan rasionalitas dengan politik marketing, dimana dalam merebut peluang sebagai seorang kandidat sebenarnya sama halnya dengan bagaimana memahami politik marketing, dimana setiap produsen mempunyai kesempatan yang sama dalam memasarkan produk (kandidat) sesuai dengan keinginannya. Kandidat yang mampu bersaing dan memenangkan peperangan adalah kandidat yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan, memenuhi keinginan pasar serta memenuhi harapan dari pasar. Artinya, dalam pendekatan ini kandidat diibaratkan sebagai sebuah produk yang akan dipasarkan kepada rakyat, untuk itu agar kandidat dapat diterima oleh pasar serta mendapat dukungan dari pasar (rakyat) maka kandidat haruslah seseorang yang berkualitas yang dapat menarik simpati rakyat untuk turut serta mendukung kandidat tersebut.

(Sumber: [www.fisip.uns.ac.id](http://www.fisip.uns.ac.id). Diakses Tanggal 13 Juni 2010).

Selanjutnya Bambang Ary Wibowo (2005), menjelaskan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan marketing terutama bagi partai politik untuk mengajukan seorang kandidat :

- a. Isu dan kebijakan politik, merupakan presensi dari kebijakan atau program yang akan dilaksanakan oleh para kandidat nanti. Dengan demikian pemilih akan tahu apa yang akan dikerjakan kandidat tersebut, misalnya seberapa besar keberanian kandidat mengikuti debat publik untuk menyampaikan visi dan misinya.

- b. Citra sosial, menunjukkan citra kandidat dalam menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi tertentu sehingga akan terjadi segmentasi pemilih di mana kandidat dapat diterima. Misalnya calon yang berasal dari kalangan intreprenneur, tentu akan lebih mudah diterima kelompok usahawan. Partai yang berbasis agama tidak akan mudah menerima calon dari non agama.
- c. Perasaan emosional, merupakan platform yang ditawarkan oleh kandidat kepada pemilih. Misalnya kandidat calon Walikota Surakarta yang akan membenahi pedagang kaki lima, tentu akan memunculkan perasaan emosional dari setiap pemilih. Ada yang simpati dan ada yang antipati.
- d. Citra kandidat, merupakan konsistensi citra diri seorang kandidat. Ketegasan, emosional yang stabil, energik, jujur dan sebagainya akan menjadi acuan bagi pemilih nanti. Misalnya bagi kandidat yang berasal dari bekas pejabat yang pada saat berkuasa terlibat korupsi, akan menjadi catatan bagi para pemilihnya.
- e. Rasionalitas pemilih. Adanya perubahan perilaku pemilih yang menjadi lebih rasional menjadi pertimbangan penting bagi para kandidat dalam mempersiapkan dirinya dan tim suksesnya.

(Sumber: [www.fisip.uns.ac.id](http://www.fisip.uns.ac.id). Diakses Tanggal 13 Juni 2010).

Berdasarkan beberapa pendapat beberapa ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian tentang perilaku pemilih sebenarnya sudah lama dilakukan oleh para ahli-ahli sebelumnya. Meskipun ada perbedaan pendapat dari para ahli-ahli tersebut justru melahirkan berbagai macam bentuk pendekatan atau konsep baru yang dapat digunakan untuk menelaah perilaku pemilih dan terutama perilaku pemilih di Indonesia.

## **B. Masyarakat Adat Lampung**

### **1. Pengertian Masyarakat**

Menurut Koentjaraningrat (1999: 147), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Masyarakat merupakan sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Menurut Seorjono Soekanto (2002: 148), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang melakukan interaksi berdasarkan hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya yang terlihat dari adanya suatu identitas bersama.

Menurut Weber dalam Soekanto (2002: 24):

Masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. Masyarakat adalah sistem dari kebiasaan atau tata cara dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia, keseluruhan yang selalu berubah ini dinamakan masyarakat, masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial dan masyarakat selalu berubah. Masyarakat merupakan suatu pergaulan hidup, oleh karena manusia itu hidup bersama. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk karena hubungan dari anggotanya. Dengan kata lain bahwa masyarakat adalah sistem yang terwujud dari kehidupan bersama, yang lazim disebut kemasyarakatan.

Selanjutnya Ralp Linton dalam Soekanto (2002: 27), berpendapat bahwa masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan

menganggap diri mereka sebagai satu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas.

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan pengertian masyarakat adalah sekelompok manusia yang hidup bersama dan menempati suatu wilayah tertentu dan menjalankan hubungan diantaranya dengan menjalankan suatu fungsi-fungsi tertentu yang saling menentukan satu sama lain.

## **2. Ciri-Ciri Masyarakat**

Masyarakat merupakan suatu kelompok manusia yang secara nyata ada maupun fiktif bertempat di wilayah tertentu, di mana anggota-anggotanya memiliki kepentingan tertentu, mempunyai suatu kesamaan perasaan bahwa hanya dengan hidup demikianlah maka kebutuhan-kebutuhan pokok untuk kelangsungan hidupnya dapat terpenuhi. Masyarakat juga dapat dimaknai sebagai hubungan antar manusia bersifat pribadi, kenal mengenal dengan akrab, sepahit-semanis, seduka-sesuka, disertai saling percaya mempercayai yang berakar pada kesatuan keturunan dan kesatuan keluarga, mempunyai kesatuan adat dan kepercayaan, sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Menurut Seokanto (2002: 150-151), ada beberapa unsur yang dapat dijadikan ciri suatu kelompok masyarakat, yaitu:

### **a. Seperasaan**

Unsur perasaan akibat seseorang berusaha untuk mengidentifikasi dirinya dengan sebanyak mungkin orang dalam kelompok tersebut, sehingga kesemuanya dapat menyebutkan dirinya sebagai “kelompok kami”, “perasaan kami” dan sebagainya.

b. Sepenanggungan

Setiap individu sadar akan perannya dengan kelompok dan masyarakat sendiri memungkinkan perannya, dalam kelompok dijalankan, sehingga dia mempunyai kedudukan yang pasti dalam darah dagingnya sendiri.

c. Saling memerlukan

Individu yang tergabung dalam masyarakat setempat merasakan dirinya tergantung pada komunitasnya yang meliputi kebutuhan fisik maupun kebutuhan psikologis.

Sementara itu menurut Koentjaraningrat (1998: 192), masyarakat merupakan sekelompok manusia yang tinggal dalam suatu wilayah tertentu sebagai satu kesatuan hukum, terorganisir, memiliki lembaga baik formal maupun non formal, dan berkaitan dengan hukum dan pemerintahan, memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Ada empat ciri penting dalam suatu kelompok yang bisa membentuk suatu masyarakat, yaitu sebagai berikut:

a. Interaksi

Interaksi dalam suatu kelompok merupakan faktor yang penting, karena melalui interaksi, individu dapat melihat perbedaan antara kelompok atau dengan istilah *coact*. *Coact* adalah orang yang secara serentak terikat dalam aktivitas yang sama namun tanpa komunikasi dengan lainnya.

b. Waktu

Sekumpulan orang yang berinteraksi dalam jangka waktu yang singkat dan tidak dapat digolongkan sebagai kelompok mempersyaratkan adanya interaksi dalam jangka waktu yang panjang, karena dengan ini ia akan memiliki karakteristik atau ciri yang tidak dimiliki oleh kumpulan sementara.

c. Ukuran atau jumlah partisipan dalam kelompok

Dalam hal ini tidak ada ukuran yang pasti mengenai jumlah anggota dalam suatu kelompok.

d. Tujuan

Mengandung pengertian bahwa keanggotaan dalam suatu kelompok akan membantu individu menjadi anggota kelompok tersebut dapat mewujudkan satu atau lebih tujuannya.

### **3. Pengertian Adat**

Menurut Hilman Hadikusuma (1999: 139), adat merupakan kebiasaan-kebiasaan perilaku manusia didalam masyarakat yang merupakan bagian kebudayaan. Menurut Zubaidi dan Zainal Abidin (1991: 1), adat adalah suatu pengungkapan tata nilai sosial budaya serta pedoman dalam berperilaku bagi masyarakat pemangkunya.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, maka adat adalah kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam suatu masyarakat, di mana kebiasaan-kebiasaan tersebut merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat itu sendiri, yang memiliki norma-norma yang berlaku dimasyarakat dalam melakukan interaksi antar individu.

Berdasarkan definisi masyarakat tersebut, yang dimaksud masyarakat Lampung dalam penelitian ini adalah suatu kesatuan hidup manusia yang terikat dalam budaya Lampung dan berinteraksi menurut adat istiadat dan budaya Lampung.

#### **4. Kondisi Sosiologis Masyarakat Lampung**

Menurut Hilman Hadikusuma (1999: 10), asal-usul penduduk Lampung, erat hubungannya dengan asal-usul istilah Lampung itu sendiri yakni kata *To-Lang-Po-Hwang* yang dapat dieja atas kata *to* yang berarti orang dalam bahasa Toraja, sedang kata *Lang-po-hwang* adalah kepanjangan dari kata Lampung. Jadi *To-Lang-po-hwang* berarti orang Lampung, sehingga erat hubungannya antara dua kata tersebut terhadap asal-usul orang Lampung.

Selanjutnya dalam Kitab *Koentjara Rajaniti* (Pegangan Raja dalam Pemerintahan) dalam Hilman Hadikusuma (1999: 12) dikemukakan bahwa ada nama-nama poyang yang banyaknya ada lima yang kesemuanya itu berasal dari Pagaruyung dan kemudian menjadi poyangnya Suku Lampung yang ada sekarang ini yaitu:

- a. Indragadjah gelar Umpu Bejalan berkedudukan di Puncak dan menurunkan Suku Lampung Abung
- b. Paklang gelar Umpu Pernong berkedudukan di Hanibung dan menurunkan Suku Lampung Pubian

- c. Sikin gelar Umpu Nyerupa berkedudukan di Sukau dan menurunkan Suku Lampung Jelma Daya
- d. Belunguh gelar Umpu Belunguh berkedudukan di Kenali dan menurunkan Suku Lampung Peminggir
- e. Indarwati gelar Putri Bulan berkedudukan di Canggiling menurunkan Suku Lampung Tulangbawang

Masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok besar masyarakat adat yaitu:

- 1) Masyarakat yang beradat Pepadun, yang terdiri dari:
  - a. Masyarakat adat Abung (Abung Siwo Megou) yang terdiri dari 9 marga geneologis
  - b. Masyarakat adat Tulangbawang/Menggala (Meggou Pak Tulangbawang) terdiri dari 4 marga geneologis
  - c. Masyarakat adat Buay Lima (Waykanan/Sungkai) terdiri dari 5 marga geneologis
  - d. Masyarakat adat Pubian (Pubian Telu Suku) terdiri dari 3 marga geneologis
- 2) Masyarakat adat Saibatin atau Peminggir/Pesisir terdiri dari:
  - a. Masyarakat adat Peminggir Melinting Rajabasa lokasinya meliputi Labuhan Maringgai, Rajabasa, dan Kalianda
  - b. Masyarakat Peminggir Teluk lokasinya sekitar Telukbetung
  - c. Masyarakat adat Peminggir Semangka lokasi daerahnya di Kecamatan Cukuh Balak, Talang Padang, Kota Agung, dan Wonosobo
  - d. Masyarakat adat Peminggir Sekalaberak lokasi daerahnya meliputi Liwa, Kenali, Pesisir Tengah, dan Pesisir Selatan

- e. Masyarakat Komering lokasi daerahnya meliputi Komering Ulu dan Komering Ilir

## **5. Unsur-Unsur Kebudayaan Masyarakat Adat Lampung**

Menurut Hilman Hadikusuma (1999: 101-112), bahwa masalah kebudayaan Lampung dalam kaitannya dengan kebudayaan nasional dan pembangunan dalam batas ruang lingkup uraian tentang budaya nilai, budaya adat, budaya bahasa, dan budaya seni dan peralatannya.

### **a. Budaya Nilai**

Para ahli kebudayaan menempatkan budaya nilai ini dari adat istiadat yang menagtur kehidupan masyarakat. Hidup manusia itu mengejar nilai dan nilai yang dikejar tersebut dipengaruhi oleh pandangan hidup atau cita hidup. Pandangan hidup itu adalah sistem pedoman tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik dalam cita-cita hidup orang atau masyarakat tertentu. Pandangan hidup orang Lampung selain di jiwai oleh nilai-nilai ajaran Islam, juga dipengaruhi rasa harga diri yang disebut dengan Pi'il Pesenggiri, yang terdiri dari:

- 2) Sakai Sembayan meliputi pengertian yang luas termasuk di dalamnya gotong royong, tolong menolong, bahu-membahu dan saling memberi segala sesuatu yang diperlukan bagi pihak lain, bukan hanya bersifat materi saja tetapi juga dalam arti moril dan pemikiran
- 3) Nemui Nyimah yang berarti bermurah hati, ramah-tamah terhadap semua pihak baik orang dalam sekeluarga atau orang lain

- 4) Nengah Nyappur berarti keharusan ikut bergaul di tengah masyarakat dengan ikut serta berpartisipasi dalam segala hal yang baik
- 5) Bejuluk Beadek didasarkan pada Kitey Gemetey yang diwarisi turun-temurun menghendaki agar seseorang di samping mempunyai nama, juga diberi gelar sebagai panggilan untuknya. Ini berarti perjuangan dalam meningkatkan derajat kehidupan dalam masyarakat

#### **b. Budaya Adat**

Tidak semua cara berfikir dan berbuat yang mewujudkan adat istiadat, yang berasal dari struktur masyarakat feodal desa itu buruk. Yang jelas, tanpa adanya kebiasaan perilaku dan adat istiadat berarti tiada hukum. Tidak sedikit wujud budaya adat tradisional dan unsur-unsurnya yang berasal dari zaman feodalisme yang baik dan merupakan kepribadian nasional. Misalnya saja, sebagaimana telah dikemukakan di atas tentang Pi'il Pesenggiri, rasa harga diri dengan kepribadian ingin bernilai baik dalam kehidupan masyarakat, suka nemui nyimah, nengah nyappur dan sakai sambayan, hal demikian itu perlu dipertahankan karena merupakan kebudayaan Timur dan kepribadian nasional. Hanya saja untuk mendukung kegiatan pembangunan perlu pembinaan dan pengarahan yang sesuai dengan konsep pandangan hidup Pancasila dan tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian maka apa yang menjadi masalah bagi kita dewasa ini adalah bagaimana menghadapi budaya adat yang lapuk dan bagaimana membinan budaya adat yang ideal.

#### **c. Budaya Bahasa**

Bahasa Lampung adalah bahasa daerah yang hanya dipakai oleh sekitar satu juta orang yang mendiami daerah Propinsi Lampung dan sebagian daerah Propinsi Sumatera Selatan di sepanjang Sungai Komering dan Danau Ranau sampai Kayuagung. Bahasa Lampung terdiri dari bahasa lisan dan bahasa tulisan yang disebut dengan aksara Lampung. Pada akhir-akhir ini sudah banyak orang tua-tua atau cendikiawan yang mengaku orang Lampung tidak lagi bisa menggunakan aksara Lampung dan sudah banyak juga angkatan muda Lampung yang kaku dan tidak lancar lagi menggunakan Bahasa Lampung. Walaupun bahasa Lampung terdiri dari terdiri dari dua dialek bahasa yang agak berbeda, yang satu berdialek A (Pemanggilan) sedangkan yang satu berdialek O (Abung), namun di antara kedua dialek itu bukan banyak perbedaan arti, melainkan berbeda dalam pengucapan. Sesungguhnya antara kedua dialek tersebut dapat dipakai secara bersama-sama sebagai bahasa sehari-hari oleh orang-orang Lampung, sebagaimana dalam musyawarah adat yang dilakukan oleh pemuka-pemuka adat.

#### **d. Budaya Seni dan Peralatannya**

Berbagai macam kesenian yang hidup di kalangan orang Lampung, adalah seni suara, seni sastra, seni musik dan seni tari, sedangkan seni lukis tidak banyak, apalagi seni patung tidak ada sama sekali. Seni suara orang Lampung kebanyakan dalam bentuk pantun yang disebut “pattun”, “syaer”, “pisk’an”, “ringget”, “bandung”, “adi-adi”, “segata”, “wayak” di berbagai daerah dilagukan perseorangan atau beramai-ramai dengan atau tanpa alat musik oleh para bujang gadis.

Dahulu pantun itu diperdengarkan pada waktu pesta adat, tetapi sekarang sudah banyak muda-mudi yang tidak lagi pandai melagukannya, karena kebanyakan lebih tertarik pada lagu-lagu modern. Sedangkan seni tari Lampung dapat dibedakan antara seni adat dan seni tari gembira. Kedua macam seni tari itu sebenarnya bersifat hiburan, hanya saja seni tari adat dilakukan pada upacara adat menurut tata tertib adat dan oleh pelaku-pelaku pria wanita menurut adat dan oleh pelaku-pelaku pria dan wanita menurut adat, begitu pula para pelakunya bebas dari ketentuan adat. Sedangkan Seni tari gembira adalah tarian yang digelar dipesta keramaian yang bukan upacara adat, Bentuk seni tari gembira banyak dipengaruhi unsur-unsur tarian dari daerah lain, seperti tari kipas, bedana, tari serai serumpun, dan tari penerimaan tamu dengan tepak sirih.

### **C. Masyarakat Adat Lampung Siwo Mego**

Menurut Hilman Hadikusuma (1999: 158), masyarakat adat Lampung Siwo Mego merupakan bagian dari masyarakat Lampung yang beradat Pepadun. Secara bahasa Siwo berarti Sembilan dan Mego berarti marga, dengan demikian Siwo Mego berarti masyarakat Lampung Abung yang memiliki sembilan marga geneologis, yaitu sebagai berikut:

1. Buay Unyi
2. Buay Unyai
3. Buay Uban
4. Buay Subing
5. Buay Beliuk

6. Buay Kunang
7. Buay Selagai
8. Buay Anak Tuha
9. Buay Nyerupa

Masyarakat adat Lampung Siwo Mego menempati wilayah tanah yang ada di sekitar Way Rarem, Way Terusan, Wai Pengubuwan dan Way Seputih. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Lampung berdialek “o” atau nyow.

Masyarakat Lampung Abung Siwo Migo berasal dari keturunan Ratu Dipuncak. Ratu Dipuncak pada mulanya bermukim di daerah Sekala Beghak ini keturunan Ratu Dipuncak menyebar ke masing-masing daerah, ada yang ke Utara dan ada yang ke Selatan diantaranya ke daerah Komerling dan Kayu Agung Sumatera Selatan dan lain sebagainya. Sedangkan yang lain lagi untuk pertama kali ke daerah Way Abung Lampung Utara. Di Way Abung ini keturunan Ratu Dipuncak mengadakan kata sepakat tentang adat mereka yaitu adat Lampung *Abung Siwo Migo*.

Pembentukan kesatuan *Abung Siwo Migo* (Abung Sembilan Marga), diawali pertemuan di suatu tempat di pinggir Way Abung, di sinilah pertemuan dan perundingan pada *Siwo Migo* yang pertama dengan keputusan delapan orang saudara Nunyai mendapat hak adat *ngejuk ngakuk*, tetapi belum mendapat adat kubumian. Besarnya pengakuk untuk Nunyai tetap 600 (enam ratus) sedangkan bagi yang lain baru 400 (empat ratus). Mereka yang menjadi saksi atau peninjau hanya boleh mendengarkan dan mengetahui saja dan belum

mendapatkan hak keadatan, dan dari sinilah lahir istilah *Abung Siwo Migo* atau *Pak Sumbai*. (Soebing, 1998: 19)

Masa Abung Siwo Migo (Abung Sembilan Marga) sekitar abad ke-18. Suatu sistem keterbukaan adat telah diberlakukan sejak zaman Minak Trio Diso, yakni adanya sistem *Mewari* (adopsi) untuk menjadi anggota adat Abung bagi orang-orang dari luar, di mana orang-orang yang diadopsi ini menjadi sama hak dan kewajibannya di dalam kemasyarakatan dan adat, dan mereka pun menjadi pimpinan (*penyimbang*) pula pada buwai masing –masing. Disamping itu ada pula di antara penyimbang-penyimbang tersebut yang melakukan “Seba” ke Banten. Penyimbang-penyimbang yang telah seba dan para penyimbang yang atas kesepakatan yang disahkan oleh *perwatin*, lalu membentuk persekutuan bersama, yakni sebanyak sembilan migo termasuk keturunan dari Minak Trio Diso sebagai penyimbang inti. (Chaidar, 1992: 51)

#### **D. Pemilihan Kepala Daerah Langsung**

Menurut Pasal 56 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 58 menyebutkan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. Berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;
- g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. Mengetahui daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;

- n. Menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. Belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. Tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Menurut Amirudin (2003: 184-186), kelebihan sistem Pemilihan Kepala Daerah langsung adalah sebagai berikut:

- a. Konkritisasi Demokrasi, dengan memberikan perspektif baru bahwa proses Pemilihan Kepala Daerah akan memenuhi kaidah proses demokrasi di dua level struktural dan kultural. Di level struktural, proses Pemilihan Kepala Daerah diduga akan lebih beradab karena melibatkan unsur Partisipasi publik yang makin meluas dari bawah sesuai aspirasi masyarakat lokal. Di level kultural, Proses Pilkada memberi keleluasaan bagi merembesnya nilai-nilai transparansi, independensi dan kejujuran.
- b. Adanya kemungkinan kekerasan terhadap proses dan kekerasan terhadap data, sedikit berkurang.
- c. Berkurangnya praktek premanisme politik uang. Jika Pilkada dilakukan secara langsung, kemungkinan politik uang dapat diminimalisasi

#### **E. Kerangka Pikir**

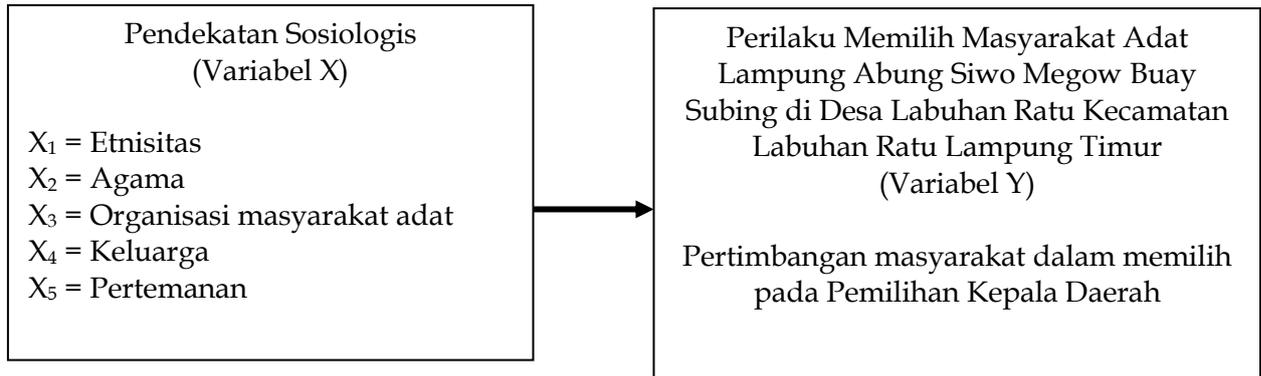
Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud Pemilu menjadi sarana yang tersedia bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpinnya untuk menjalankan kedaulatan rakyat. Pemilihan Kepala Daerah merupakan kesempatan bagi seluruh masyarakat untuk memilih pejabat-pejabat

pemerintahan yang akan menjadi pemimpin seluruh masyarakat, termasuk masyarakat adat.

Masyarakat adat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat adat Lampung. Secara garis besar masyarakat Lampung terdiri dari dua kelompok masyarakat adat, yaitu masyarakat adat Pepadun dan masyarakat adat Pesisir. Masyarakat beradat Pepadun kebanyakan bermukim di daerah pedalaman, sedangkan yang beradat Pesisir bermukim di daerah pesisir atau di daerah yang tidak termasuk daerah lingkungan pepadun. Termasuk dalam lingkungan beradat pepadun adalah orang-orang Abung, Tulangbawang (Menggala), Waykanan Sungkai, Pubiyan.

Perilaku memilih masyarakat dalam penelitian ini dibatasi pada pendekatan sosiologis, dengan pertimbangan bahwa karakteristik sosial dan pengelompokan sosial secara teoritis mempunyai pengaruh yang cukup signifikan dalam menentukan perilaku pemilih. Pengelompokan sosial tersebut terdiri dari etnisitas, agama, organisasi masyarakat adat, keluarga dan pertemanan.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh etnisitas, agama, organisasi masyarakat adat, keluarga dan pertemanan terhadap perilaku memilih Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego Buay Subing di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2010. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut:



Gambar 1.  
Kerangka Pikir Penelitian

## F. Hipotesis

Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Ho : Tidak Ada pengaruh etnisitas, agama, organisasi masyarakat adat, keluarga dan pertemanan terhadap perilaku memilih Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego Buay Subing di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2010
- Ha : Ada pengaruh etnisitas, agama, organisasi masyarakat adat, keluarga dan pertemanan terhadap perilaku memilih Masyarakat Adat Lampung Abung Siwo Mego Buay Subing di Desa Labuhan Ratu Kecamatan Labuhan Ratu dalam Pemilihan Kepala Daerah Lampung Timur Tahun 2010